

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

#### **3.1 Sejarah Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang**

Sejarah departemen pekerjaan umum di pemerintahan pusat, dalam perkembangan waktu dalam tahap-tahapan; sejak jaman penjajahan pemerintahan belanda; dimana istilah “ pekerjaan umum ” berasal dari terjemahan istilah bahasa belanda “ openbare werken” . Pada zaman hindia belanda disebut “ waterstaat swerken”. Di lingkungan pusat pemerintahan dibina oleh departement van verkeer & waterstaat ( Dep. V&W ).

Pada tiap-tiap wilayah organisasi pemerintahan militer jaman hindia belanda disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dari pihak jepang. Maka kantor pusat “V & W” di bandung, dinamakan “Kotubu Bunsitsu”, oleh pihak jepang. Dan mulai saat itu istilah “Pekerjaan omemoem” (P.O), Oerosean Pekerdjaan Oemoem (O.P.O), “Pekerjaan Umum” (PU), disamping “Doboku” lazim dipergunakan.

Setelah Indonesia memproklamkan Kemerdekaan pada tanggal 17-8-1945, maka semenjak itu pemuda-pemuda Indonesia mulai berangsur-angsur merebut kekuasaan pemerintahan (Jakarta/Bandung) maupun pemerintahan daerah-daerah. Sesudah pemerintahan Indonesia membentuk cabinet yang pertama, maka para menteri mulai menyusun organisasi serta sifatnya.

Pekerjaan umum pada waktu itu (1945) berpusat di bandung, dengan mengambil tempat bekas gedung, V & W ( dikenal dengan nama “Gedung Sate”). Ketika belanda ingin mengembalikan kekuasaan pemerintahan di Hindia Belanda sebelum perang, datang mengikuti tentera sekutu masuk ke Indonesia. Akibat dari keinginan Pemerintah Belanda ini, terjadilah pertentangan fisik dengan Pemuda Indonesia yang ingin mempertahankan tanah air berikut gedung-gedung yang telah didudukinya, antara lain “Gedung Sate” yang telah menjadi Gedung Departemen Pekerjaan Umum pada waktu itu.

Dalam masa prolog G 30 S. PKI terjadilah dalam sejarah pemerintahan RI suatu Kabinet yang besar disebut dengan nama Kabinet Dwikora atau Kabinet 100 Menteri, dimana pada masa ini dibentuk Koordinator Kementrian. Tidak luput Departemen PUT.yang pada masa itu ikut mengalami perubahan organisasi menjadi 5 Departement. Dibawah Kompartemen PUT Kabinet Dwikora, dipimpin Jenderal Suprajogi. Adapun Kompartemen PUT membawahi :

1. Departemen Listrik dan Ketenagaan
2. Departemen Bina Marga
3. Departemen Cipta Karya Konstruksi
4. Departemen Pengairan Dasar
5. Departemen Jalan Raya Sumatera

Pada tanggal 24 november 1945, dibagian utara kota, meletus suatu pertempuran yang hebat. Penduduk sekitarnya banyak yang mengungsi ke kota lain yang keadaannya masih aman. Waktu itu Gedung sate dipertahankan oleh Gerakan Pemuda PU yang diperkuat oleh satu Pasukan Badan Perjuangan yang terdiri dari lebih kurang 40 orang dengan persenjataan yang agak lengkap. Tetapi, bantuan yang diberikan itu tidak lama, karena pada tanggal 29 November 1945, pasukan tersebut lalu ditarik dari Markas Pertahanan Departemen Perhubungan dan Pekerjaan umum.

Tanggal 3 Desember 1945, jam 1.00 pagi, waktu itu kantor Departemen Perhubungan dan Pekerjaan Umum di Jl. Diponegoro 22 Bandung yang dikenal dengan Gedung Sate hanya dipertahankan oleh 21 orang. Tiba-tiba Datang pasukan Tentara Sekutu/Belanda dengan persenjataan yang berat dan modern.

Walaupun demikian petugas yang mempertahankan Gedung Sate ini tak mau menyerah begitu saja. Mereka mengadakan perlawanan mati-matian dengan segala kekuatan yang dimiliki tetap mempertahankan kantor yang akan direbut itu. Mereka dikepung rapat dan diserang dari segala penjuru.

Pertempuran yang dahsyat itu memang tidak seimbang.Pertempuran ini baru berakhir pada pukul 14.00 WIB.Dalam pertempuran tersebut diketahui dari 21

orang pemuda, 7 diantaranya hilang. Satu orang luka berat dan beberapa orang lainnya luka-luka ringan. Setelah dilakukan penelitian ternyata para pemuda yang hilang itu diketahui bernama: Didi Hardianto Kamarga, Muchtaruddin, Soehodo, Rio Soesilo, Soebengat, Ranu dan Soerjono.

Semula memang belum diketahui dengan pasti, dimana jenaazah dari ketujuh orang pemuda ini berada. Baru pada bulan Agustus 1952 oleh beberapa bekas kawan seperjuangan mereka dicari disekitar Gedung sate, dan hasilnya hanya ditemukan empat jenazah yang sudah berupa kerangka.

Keempat kerangka para suhada ini kemudian dipindahkan ke Taman Makan Pahlawan Cikutra, Bandung. Sebagai penghargaan atas jasa-jasa dari tiga orang lainnya yang kerangkanya belum ditemukan telah dibuatkan 2 tanda peringatan. Satu dipasang didalam Gedung Sate dan lainnya berwujud sebuah batu alam yang besar ditandai dengan tulisan nama-nama ketujuh orang pahlawan tersebut yang ditempatkan dibelakang halaman Gedung Sate.

Sebelumnya, yakni pada tanggal 3 Desember 1951 oleh Menteri Pekerjaan Umum pada waktu itu, Ir. Ukar Bratakusuma, ketujuh pemuda pahlawan tersebut dinyatakan dan dihormati sebagai “Pemuda Yang Berjasa” dan tanda penghargaan itu telah pula disampaikan pada para keluarga mereka yang ditinggalkan. Tanggal 3 Desember merupakan hari yang punya “Makna Khusus” bagi warga Departemen Pekerjaan Umum.

Karena pada tanggal tersebut tujuh puluh lima tahun yang lalu terjadi peristiwa bersejarah. Gugur tujuh orang karyawan yang berjuang mempertahankan markas Departemen PU dikota Bandung yang dikenal sebagai “Gedung Sate” Peristiwa ini kemudian dikenang dan diperingati sebagai Hari Kebaktian Pekerjaan Umum.

Gedung V & W ini dipertahankan mati-matian sampai titik darah penghabisan oleh para pemuda/ pegawai Departemen PU. Karena mereka sadar. Bahwa gedung tersebut pada waktu itu dipergunakan sebagai kantor pusat Departemen. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia diproklamirkan, para pemuda pegawai

Departemen Pekerjaan Umum tidak mau ketinggalan dengan pemuda-pemuda lainnya dikota Bandung.

Mereka mempersiapkan diri dalam menghadapi segala kemungkinan yang sekiranya akan dapat merintangi serta mengganggu kemerdekaan yang telah diproklamasikan. Jiwa dan semangat perjuangan yang menyala-nyala dari para patriot muda ini kemudian dihimpun dan disalurkan dalam suatu gerakan yang teratur dalam bentuk organisasi dengan nama gerakan Pemuda PU.

Gedung sate, telah berhasil diambil alih oleh gerakan Pemuda PU dari tangan Jepang. Kewajiban mereka selanjutnya pada saat itu adalah mempertahankan dan memelihara apa yang telah diambil oleh alih itu jangan sampai direbut kembali oleh musuh. Untuk dapat menyusun pertahanan yang kompak, maka gerakan pemuda ini lalu membentuk suatu seksi pertahanan yang dipersenjatai seperti granat, beberapa pucuk bedil dan senjata api lainnya hasil rampasan dari tentara Jepang.

Mulanya gerakan pemuda ini hanya menghadapi satu kekuatan lawan. Yaitu tentara Jepang. Namun menjelang akhir bulan September 1945, ditengah air ini mulailah mengalir tentara Sekutu yang katanya ditugaskan untuk menjaga keamanan dan menyelesaikan tawanan perang akibat bertekuk lutunya Jepang pada Sekutu

### **Sumpah Setia**

Tepatnya tanggal 4 Oktober 1945, kota Bandung dimasuki tentara Sekutu yang di ikuti oleh serdadu Belanda dan NICA. Sejak saat itu suasana kota Bandung menjadi semakin tidak aman. Sejak itu pula gerakan pemuda pejuang harus berhadapan dengan tentara Jepang dan tentara Sekutu, Belanda dan NICA. Dengan semakin gawatnya situasi pada waktu itu, para pegawai dari Kantor Pusat Departemen PU dibawah pimpinan Menteri Muda Perhubungan dan Pekerjaan Umum. Ir Pangeran Noor pada tanggal 20 Oktober telah mengangkat Sumpah Setia Kepada Pemerintah Republik Indonesia.

Hampir setiap hari kantor Departemen Perhubungan dan Pekerjaan Umum dikacau oleh tentara Sekutu/Belanda/NICA, akibatnya para pegawai tidak dapat

melaksanakan tugasnya dengan tenang. Oleh karena itu, pada mulanya semua pegawai Departemen Perhubungan dan Pekerjaan Umum diperkenankan untuk tidak masuk kantor selama situasi belum aman. Kecuali para pegawai yang memang disertai barang-barang milik negara yang ada di dalamnya. Tugas yang berat ini mereka terima sebagai suatu kewajiban yang mulia yang akan dilaksanakan dengan taruhan jiwa dan raga.

### **Hari Bakti**

Satu hari menjelang genap Dwi Windu Usia peristiwa 3 Desember 1945 tepatnya tanggal 2 Desember 1961, Menteri Pertama Ir. H. Djuanda (almarhum) telah memberi "Pernyataan Penghargaan" tertulis kepada mereka para pemuda pegawai yang gugur pada tanggal 3 Desember 1945 dalam mempertahankan Gedung yang pertama dari Departemen Pekerjaan Umum Republik Indonesia, di Jl. Diponegoro Nomor 22 Bandung. Peristiwa 3 Desember 1945 ini telah tercatat dalam sejarah perjuangan bangsa, dan sejarah perkembangan Pekerjaan Umum pada khususnya.

Peristiwa ini telah mempersembahkan "Septa Taruna Kesatrianya" keharibaan Ibu Pertiwi. Dan melahirkan suatu korps Pemuda/Pegawai Pekerjaan Umum yang mempunyai kesadaran sosial, jiwa kesatuan (Corp-geest), rasa kesetiakawanan (Solidaritas) serta kebanggaan akan tugasnya sebagai abdi masyarakat, khususnya dalam bidang pekerjaan umum. Peristiwa 3 Desember 1945 akan terus dikenang dan diperingati sebagai Hari Kebaktian Pekerjaan Umum. Saat ini para pegawai Departemen Pekerjaan Umum terus berjuang untuk melanjutkan pengabdian mereka terhadap nusa dan bangsa.

### **3.2 Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pembangunan daerah dan membantu Walikota Padang dalam menyusun dan merumuskan kebijakan



teknis dibidang pembangunan daerah dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas, terutama produk berupa pembangunan daerah. Untuk itu, disusunlah Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya.

Dalam hal ini Visi dan Misi yang disusun harus dikaitkan dengan RPJMD 2019 – 2023. Berikut adalah Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang :

### **3.2.1 VISI DPUPR Kota Padang**

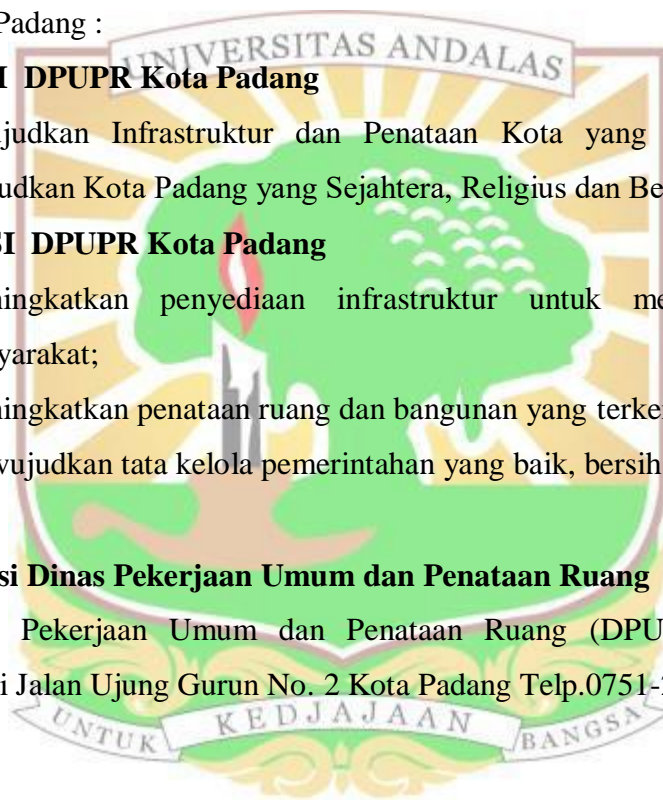
“Mewujudkan Infrastruktur dan Penataan Kota yang Berkualitas dalam Mewujudkan Kota Padang yang Sejahtera, Religius dan Berbudaya”.

### **3.2.2 MISI DPUPR Kota Padang**

- a. Meningkatkan penyediaan infrastruktur untuk melayani kebutuhan masyarakat;
- b. Meningkatkan penataan ruang dan bangunan yang terkendali;
- c. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani.

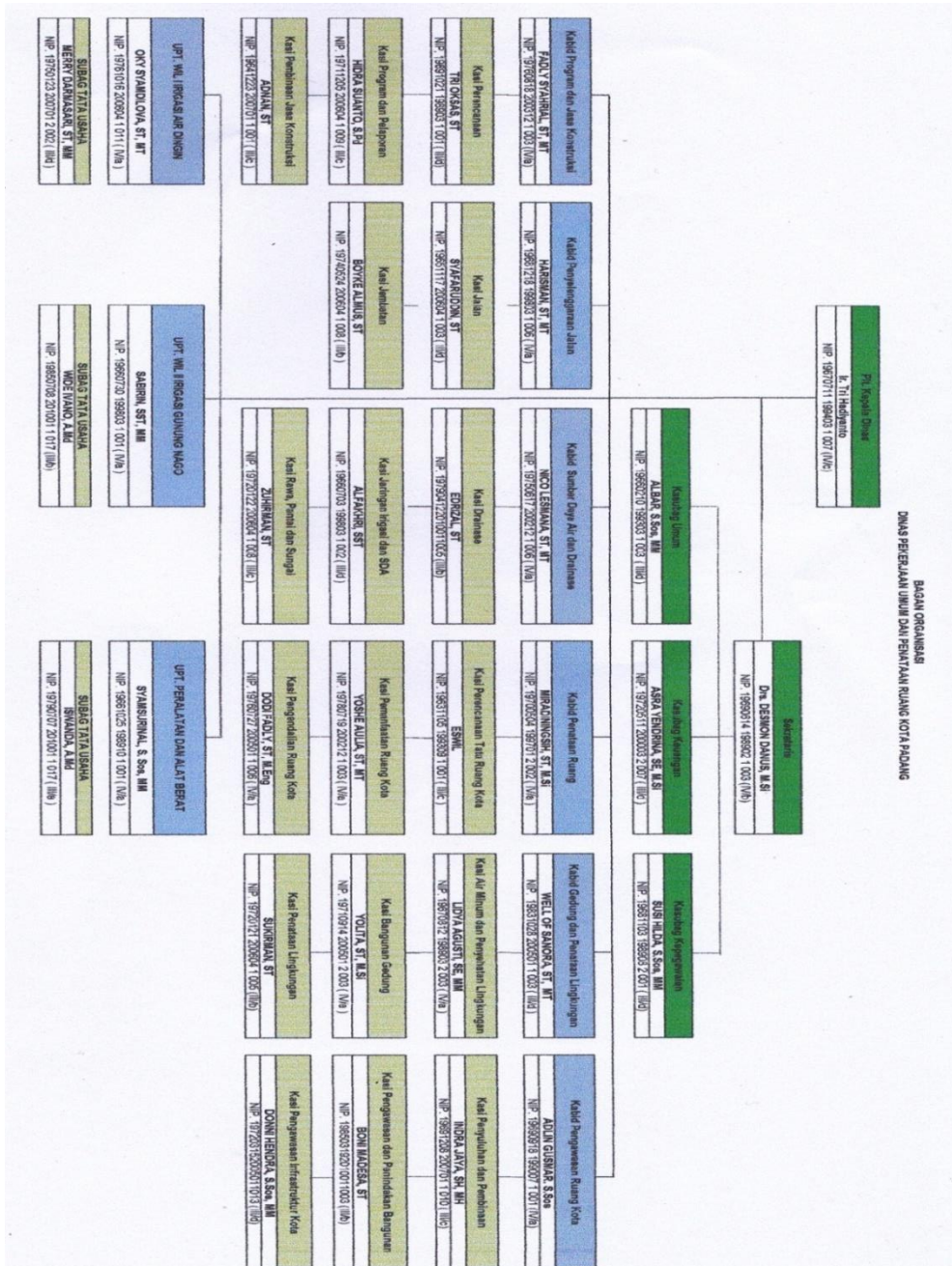
### **3.3 Lokasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Padang beralamat di Jalan Ujung Gurun No. 2 Kota Padang Telp.0751-21414.



### 3.4 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang digambarkan sebagai berikut:



Sesuai Peraturan Walikota Padang Nomor 16.A Tahun 2017 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dan mengatur penyelenggaraan urusan pengelolaan dinas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya pengelolaan dinas yang akuntabel untuk mendukung keberhasilan pembangunan daerah.

Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Selanjutnya kepala sub bagian umum, sub bagian keuangan dan sub bagian kepegawaian yang bertanggung jawab kepada sekretaris. Pada Dinas PUPR terdapat 6 bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yaitu Bidang Program dan Jasa Konstruksi, Bidang Bina Marga, Bidang Sumber Daya Air, Bidang Pemetaan dan Tata Ruang, Bidang Tata Bangunan dan Perizinan, Bidang Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang dan Bangunan.

### **3.5 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Sebagaimana telah disebutkan pada penjelasan struktur organisasi diatas, Pada Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang, Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan dinas dalam urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, perpustakaan, evaluasi dan pelaporan.

#### **3.5.1 Tugas Pokok DPUPR Kota Padang**

- a. Kepala Dinas mempunyai tugas:
  - Mengkoordinasi penyusunan program Dinas Pekerjaan Umum



dengan memberikan arahan kepada sekretaris dan Kepala Bidang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategik (Renstra) Kabupaten, Kebijakan Bupati dan kondisi obyektif serta ketentuan yang berlaku.

- Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pelayanan di bidang pekerjaan umum.
- Mengupayakan peningkatan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam bidang pekerjaan umum.
- Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidangnya berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- Mengusulkan, menunjuk, menetapkan dan melaksanakan pembinaan pejabat pengelolaan keuangan.
- Membina bawahan dalam pencapaian program dinas dengan memberi petunjuk pemecahan masalah agar bawahan mampu melaksanakan tugas jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun yang sudah dan sedang berjalan berdasarkan rencana dan realisasi sebagai bahan dalam penyusunan sasaran tahun berikutnya.
- Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan rencana kerja, hasil yang dicapai sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier.
- Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang pekerjaan umum serta menyusun kebijakan teknis petunjuk pemecahan masalah.
- Melaporkan hasil pelaksanaan tugas atau kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai penanggungjawab

pelaksanaantugas.

- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat mempunyai tugas :

- Menghimpun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan pedoman dan petunjuk teknis urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi danpelaporan.
- Menyusun rencana program urusan umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pelaporan berdasarkan kebijakan bidang pekerjaan umum.
- Mengkoordinasi semua bidang dalam rangka menghimpun perencanaan kegiatan, evaluasi dan menganalisa data serta laporan hasil kegiatan SKPD.
- Mengkoordinasi Kepala Sub Bagian dan kegiatan kesekretariatan agar terjalin kerjasama yang baik dan salingmendukung.
- Menyiapkan usulan, penunjukan, penetapan pejabat pengelolaan keuangan.
- Melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian dan bawahan berdasarkan pembagian tugas agar dapat berjalan denganlancar.
- Menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasilkerja.
- Melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaantugas.
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- Menyiapkan bahan, merencanakan, mengelola data dan informasi yang berhubungan dengan urusan umum dan kepegawaian sebagai bahan penyusunan kebijakan.
- Menyusun rencana program kegiatan dan laporan pelaksanaan kegiatan urusan umum dan kepegawaian.
- Melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas urusan umum dan kepegawaian dinas.
- Melaksanakan administrasi surat-menyurat, ekspedisi, penggandaan, kearsipan, pengadaan alat tulis kantor, akomodasi rapat, pertemuan, upacara, penerimaan tamu serta pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan rumah tangga dan bahan inventaris dinas.
- Menyiapkan kebutuhan serta perlengkapan perjalanan dinas dan mengatur penggunaan kendaraan dinas.
- Mengatur dan mengelola tata ruang kantor, kebersihan, ketertiban, keamanan, kenyamanan dan keserasian ruang kantor.
- Menyiapkan bahan usulan pengembangan karier pegawai.
- Menyiapkan bahan usulan mutasi pegawai.
- Menyiapkan, menghimpun dan mengelola data pegawai serta menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK).
- Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dalam pembinaan pegawai.
- Mengkoordinasikan, membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugas.

- Menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerja.
- Melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
- Melaporkan hasil pelaksanaan tugas atau kegiatan kepada atasan.
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

d. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas:

- Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis perencanaan
- Menyusun rencana program kegiatan dan laporan pelaksanaan kegiatan dinas.
- Membagi tugas, melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas urusan perencanaan dan pelaporan.
- Menyiapkan bahan perubahan, pergeseran dan perhitungan program kerja akibat adanya perubahan, pergeseran dan perhitungan anggaran dinas.
- Menghimpun, mengolah dan menganalisis data serta penyajian data statistik hasil kegiatan dinas.

e. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:

- Menyiapkan bahan, merencanakan, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan urusan keuangan sesuai dengan perundangan yang berlaku.
- Menyusun rencana kegiatan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan sub bagian keuangan.

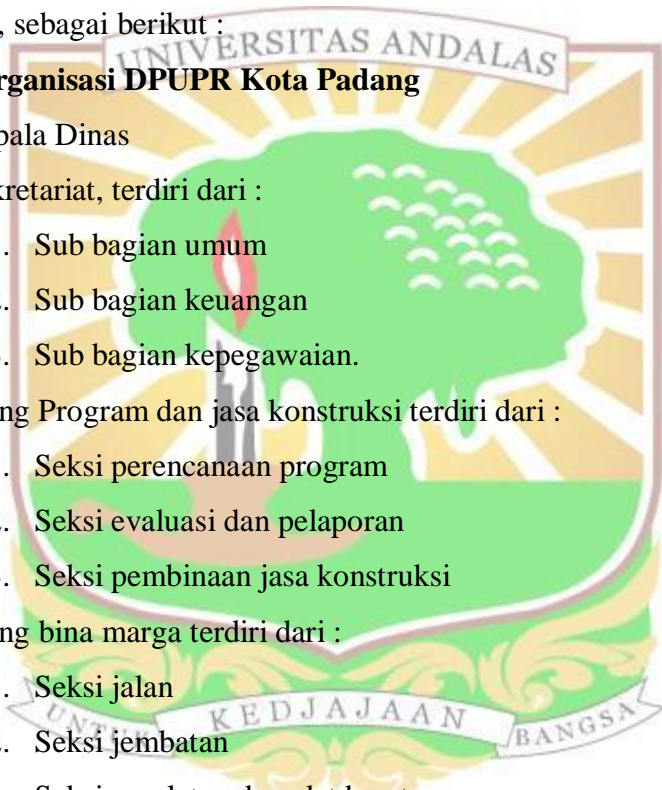


- Melaksanakan penelitian dan verifikasi kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang di ajukan bendaharadinas.
- Menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan.

Guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang tersebut, susunan struktur organisasi dinas ditetapkan berdasarkan Pasal 3 Peraturan Walikota Padang Nomor 16.A Tahun 2017, sebagai berikut :

### 3.5.2 Struktur Organisasi DPUPR Kota Padang

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  1. Sub bagian umum
  2. Sub bagian keuangan
  3. Sub bagian kepegawaian.
- c. Bidang Program dan jasa konstruksi terdiri dari :
  1. Seksi perencanaan program
  2. Seksi evaluasi dan pelaporan
  3. Seksi pembinaan jasa konstruksi
- d. Bidang bina marga terdiri dari :
  1. Seksi jalan
  2. Seksi jembatan
  3. Seksi peralatan dan alat berat
- e. Bidang Sumber daya air terdiri dari:
  1. Seksi drainase
  2. Seksi jaringan irigasi dan sumber daya air
  3. Seksi rawa pantai dan sungai
- f. Bidang pemetaan dan tata ruang, terdiri dari :
  1. Seksi perencanaan tata ruang kota



2. Seksi pemetaan dan pengolahan basis data spasial
3. Seksi perlengkapan prasarana kota
- g. Bidang tata bangunan dan perizinan terdiri dari :
  1. Seksi perencanaan tata bangunan dan perizinan
  2. Seksi pengarahan arsitektur dan konstruksi
  3. Seksi kelayakan bangunan gedung
- h. Bidang pengendalian dan pengawasan tata ruang dan bangunan terdiri dari :
  1. Seksi penyuluhan dan pembinaan
  2. Seksi pengawasan, penertiban dan penindakan
- i. Seksi penyelesaian pengaduan sengketa...
- j. Unit pelaksana teknis dinas, terdiri dari :
  1. UPTD Irigasi Wilayah I Irigasi, Air Dingin
  2. UPTD Irigasi Wilayah II Irigasi, Gunung Nago
  3. UPTD Perencanaan, Logistik dan Operasional Penerangan Jalan Umum
- k. Kelompok jabatan fungsional.

### 3.6 Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Secara umum, tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Sesuai Peraturan Walikota Padang Nomor 68 Tahun 2016 salah satu diantaranya adalah sebagaimana tercantum pada bagian I Pasal 2 adalah melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan Azas Otonomi, Sedangkan Fungsinya adalah :

- a. Perumusan kebijakan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang

- d. Pelaksanaan administrasi dinas bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Memiliki Karyawan Sebanyak 135 karyawan yang terdiri dari Karyawan Pimpinan dan Karyawan Staf (Karyawan Pelaksana) dengan komposisi dapat digambarkan pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.1 Rincian Kepegawaian Dinas PUPR Kota Padang**

No	Jumlah Personil	
	Uraian	Jumlah
1	Kepala Dinas	1
2	Sekretaris	1
3	Kepala Bidang	6
4	Kepala Seksi/ Kasubbag	21
5	Kepala UPTD	2
6	Kepala Tata Usaha UPTD	2
7	Staff	102
<b>Jumlah</b>		<b>135</b>

**Tabel 3.2 Rincian Kepegawaian Dinas PUPR Kota Padang Per-Golongan**

No	Bidang	Golongan				Jumlah
		IV	III	II	I	
1	Sekretariat	2	12	5		19
2	Bina Program Dan Jasa Konstruksi	1	9	2		12

3	Bina Marga		10	7		17
4	Sumber Daya Air		10	5		15
5	Pengendalian Dan Pengawasan Tata Ruang Dan Bangunan	1	7	3		11
6	Pemetaan Dan Tata Ruang	2	13	3		18
7	Tata Bangunan Dan Perizinan Tata Ruang Dan Bangunan	2	14	1		17
8	UPT. Operasional Penerangan Jalan Umum		2	2		4
9	UPT. Wilayah II (Gunung Nago)		3	6		9
10	UPT. Wilayah (Air Dingin)		2	9	2	13
<b>Total</b>		<b>8</b>	<b>82</b>	<b>43</b>	<b>2</b>	<b>135</b>

**Tabel 3.3 Rincian Kepegawaian Dinas PUPR Kota Padang  
Per-Jenjang Pendidikan**

No	Bidang	Pendidikan					Jumlah
		S 2	S I	D III	SMA	SLTP	
1	Sekretariat	5	5	5	4	-	19
2	Bina Program Dan Jasa Konstruksi	2	8	1	1	-	12
3	Bina Marga	4	4	2	7	-	17
4	Sumber Daya Air	2	7	-	6	-	15
5	Pengendalian Dan Pengawasan Tata Ruang Dan Bangunan	1	6	1	3	-	11
6	Pemetaan Dan Tata Ruang	4	5	1	8	-	18



7	Tata Bangunan Dan Perizinan Ruang Dan Bangunan	3	9	1	4	-	17
8	UPT. Operasional Penerangan Jalan Umum	-	2	1	1	-	4
9	UPT. Wilayah II (Gunung Nago)	1	-	-	5	3	9
10	UPT. Wilayah I (Air Dingin)	1	2	9	1	2	13
<b>JUMLAH</b>		<b>22</b>	<b>48</b>	<b>12</b>	<b>48</b>	<b>5</b>	<b>135</b>

Sumber: Renstra 2014-2019. Padang : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang

